

Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba)

The Influence of Transparency and Competence of Village Officials on Accountability in Village Fund Management (an Empirical Study of Villages in Laguboti District, Toba Regency)

Erwin Daniel Rifaldi Sibaran¹✉, Nasirwan²

1, 2) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Medan, Indonesia

✉ Corresponding author:
sibaranierwin01@gmail.com

Abstrak

Akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan tantangan struktural yang serius di Indonesia, termasuk di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa secara langsung. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei terhadap aparatur desa di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang disebarakan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan kepala urusan keuangan sebagai responden. Analisis data menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3 melalui 5.000 subsamples bootstrapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan koefisien jalur $\beta = 0,411$, t-statistik = 5,682, dan p-value = 0,000; (2) kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan koefisien jalur $\beta = 0,347$, t-statistik = 5,424, dan p-value = 0,000. Temuan ini mengimplikasikan bahwa peningkatan keterbukaan informasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa merupakan dua pilar utama yang perlu diperkuat secara simultan guna mewujudkan tata kelola keuangan desa yang akuntabel di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba.

Kata Kunci: Transparansi, Kompetensi Aparatur Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa

Abstract

Accountability in village fund management is a serious structural challenge in Indonesia, including in Laguboti District, Toba Regency. This study aims to directly examine the influence of transparency and competence of village officials on accountability in village fund management. The study was conducted with a quantitative approach using a survey method on village officials in Laguboti District, Toba Regency. Data collection was carried out through questionnaires distributed to village heads, village secretaries, and heads of financial affairs as

respondents. Data analysis used the Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method with SmartPLS 3 software through 5,000 bootstrapping subsamples. The results of the study indicate that: (1) transparency has a positive and significant effect on accountability in village fund management with a path coefficient of $\beta = 0.411$, t-statistic = 5.682, and p-value = 0.000; (2) The competence of village officials has a positive and significant effect on the accountability of village fund management with a path coefficient of $\beta = 0.347$, t-statistic = 5.424, and p-value = 0.000. This finding implies that increasing information transparency and strengthening the human resource capacity of village officials are two main pillars that need to be strengthened simultaneously in order to realize accountable village financial governance in Laguboti District, Toba Regency.

Keyword: *Transparency, Competence of Village Apparatus, Accountability of Village Fund Management, Village Funds*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut [1]. Dalam perspektif teori keagenan (agency theory), hubungan antara pemerintah sebagai pengelola (agent) dan masyarakat sebagai pemilik mandat (principal) menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang transparan dan dapat diverifikasi guna meminimalkan asimetri informasi antara kedua pihak [2].

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa secara langsung kepada setiap desa di seluruh Indonesia. Alokasi dana desa menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari Rp21 triliun pada tahun 2015 hingga mencapai kisaran Rp70–71 triliun pada tahun 2023–2025 [3]. Besarnya alokasi ini membawa konsekuensi berupa tuntutan pengelolaan yang semakin transparan dan akuntabel di tingkat desa.

Namun demikian, Indonesia Corruption Watch ([4]) mencatat bahwa pemerintahan desa kembali menjadi sektor dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia, dengan 77 kasus penindakan, 108 tersangka yang mayoritas adalah kepala desa dan perangkat desa, serta total kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp80,8 miliar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK, 2023) juga menemukan permasalahan berulang meliputi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, penyaluran dana yang tidak sesuai prosedur, serta lemahnya sistem pengendalian intern di tingkat desa [5].

Permasalahan akuntabilitas tersebut juga teridentifikasi secara nyata di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba. Di Desa Pardinggaran, warga dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menolak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Desa karena ditemukan kejanggalan antara dokumen pelaporan dengan realisasi fisik di lapangan, khususnya dugaan manipulasi volume pada proyek infrastruktur irigasi (T. Simanjuntak, 2024). Di Desa Sitangkola, pengelolaan dana desa dilakukan secara sepihak oleh Kepala Desa tanpa melibatkan Kepala Urusan dan Kepala Seksi [6]. Lebih jauh, Kepala Desa Sibuea bahkan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri dengan modus penggelembungan harga dan program fiktif yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp155.184.000 (L. M. Simanjuntak, 2022). Selain itu, hingga akhir Oktober 2025, hanya 40 dari 230 desa di Kabupaten Toba yang berhasil mencairkan Dana Desa Tahap II akibat ketidakmampuan aparaturnya menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara tepat waktu [7].

Dalam literatur akademis, transparansi dan kompetensi aparatur desa telah diidentifikasi sebagai faktor penentu utama akuntabilitas. Transparansi didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah desa dalam memberikan informasi yang jujur, lengkap, dan tepat waktu kepada masyarakat terkait seluruh aspek pengelolaan dana desa [8]. Sejumlah penelitian telah membuktikan pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap akuntabilitas, di antaranya Saputra et al. (2024), Lihawa et al. (2025), serta Sihotang et al. (2024). Meskipun demikian, Bahtiar et al. (2024) menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan, sehingga inkonsistensi temuan ini masih memerlukan pengujian lebih lanjut [9].

Kompetensi aparatur desa mencerminkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan perangkat desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan (Spencer & Spencer, 1993). Bahtiar et al. (2024), Kastanya & Ipijei (2024), serta Sihotang et al. (2024) mengonfirmasi pengaruh positif kompetensi terhadap akuntabilitas. Namun inkonsistensi juga ditemukan dalam banyak studi lain, seperti Ikhwan et al. (2024), Setiyawati et al. (2025), Rahmawati et al. (2023), serta Fitra et al. (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan. Inkonsistensi temuan-temuan tersebut mengindikasikan perlunya pengujian ulang yang kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh langsung transparansi dan kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa-desa di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba [10]. Penelitian ini relevan sebagai upaya menjawab kesenjangan empiris (research gap) atas inkonsistensi temuan penelitian terdahulu serta memberikan kontribusi berbasis bukti bagi perbaikan tata kelola keuangan desa di wilayah tersebut [11].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei. Populasi penelitian adalah seluruh aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner tertutup dengan skala Likert lima poin kepada seluruh responden [12].

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas dua variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen pertama adalah transparansi (X_1) yang diukur menggunakan indikator yang dikembangkan dari Kristianten [13] dalam Ardiyanti (2019), mencakup: (a) ketersediaan dan aksesibilitas dokumen, (b) kejelasan dan kelengkapan informasi, (c) keterbukaan proses, serta (d) kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Variabel independen kedua adalah kompetensi aparatur desa (X_2) yang diukur menggunakan indikator dari Mada et al. (2017), yaitu: (a) pengetahuan (knowledge), (b) keahlian (skills), dan (c) sikap (attitude). Variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) yang diukur berdasarkan lima tahapan siklus pengelolaan keuangan desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban [14].

Analisis data dilakukan menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan perangkat lunak SmartPLS 3 melalui dua tahap utama. Tahap pertama adalah evaluasi outer model (model pengukuran) yang mencakup pengujian validitas konvergen melalui nilai outer loading dan Average Variance Extracted (AVE), validitas diskriminan melalui Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT), serta reliabilitas konstruk melalui Composite Reliability (CR) dan Cronbach's Alpha [15]. Tahap kedua adalah evaluasi inner model (model struktural) yang mencakup pengujian koefisien determinasi (R^2), effect size (f^2), dan relevansi prediktif (Q^2). Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping dengan 5.000 subsamples pada tingkat signifikansi 5% (two-tailed) [16], di mana hipotesis diterima apabila nilai t-statistic > 1,96 dan p-value < 0,05 [17].

HASIL DAN PEMBAHASAN**Hasil Uji Outer Model**

Evaluasi model pengukuran (outer model) dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh instrumen penelitian memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Seluruh indikator pada ketiga variabel penelitian memiliki nilai outer loading > 0,70, nilai AVE > 0,50, nilai CR > 0,70, dan nilai Cronbach's Alpha > 0,70, sehingga seluruh konstruk dinyatakan valid dan reliabel. Selain itu, pengujian validitas diskriminan menggunakan kriteria HTMT menunjukkan bahwa seluruh nilai HTMT berada di bawah 0,85, yang mengonfirmasi bahwa setiap konstruk benar-benar berbeda dan unik dari konstruk lainnya [18].

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel transparansi memperoleh penilaian yang sangat tinggi dari seluruh responden, dengan indikator yang memperoleh nilai rata-rata tertinggi adalah penyampaian informasi penggunaan dana desa melalui media informasi desa [19]. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa di Kecamatan Laguboti dinilai telah berupaya menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat [20]. Variabel kompetensi aparatur desa juga memperoleh penilaian yang sangat tinggi dari responden, menunjukkan bahwa aparatur desa di Kecamatan Laguboti dinilai memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan desa. Demikian pula variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa memperoleh penilaian yang sangat tinggi, yang mencerminkan bahwa responden menilai seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan secara bertanggung jawab [21].

Hasil Uji Inner Model

Evaluasi model struktural (inner model) menunjukkan nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,791 untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai ini mengindikasikan bahwa 79,1% variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel transparansi dan kompetensi aparatur desa dalam model penelitian ini. Nilai predictive relevance (Q^2) yang diperoleh juga berada di atas 0, mengonfirmasi bahwa model memiliki relevansi prediktif yang memadai [22].

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada SmartPLS 3 dengan 5.000 subsamples. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Langsung (Direct Effect)

Hipotesis	Hubungan Antar Konstruk	β	T-Statistik	P-Value	Keputusan
H ₁	Transparansi (X ₁) → Akuntabilitas (Y)	0,411	5,682	0,000	Diterima
H ₂	Kompetensi Aparatur Desa (X ₂) → Akuntabilitas (Y)	0,347	5,424	0,000	Diterima

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dibuktikan oleh nilai koefisien jalur $\beta = 0,411$, t-

statistik = 5,682 > 1,96, dan p-value = 0,000 < 0,05. Nilai effect size (f^2) sebesar 0,236 mengategorikan pengaruh ini dalam kategori efek sedang (Hair et al., 2021). Dengan demikian, H_1 diterima [23].

Temuan ini bermakna bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan pemerintah desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat diwujudkan [24]. Keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa memberikan akses kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan, sehingga mendorong aparatur desa untuk bertindak lebih bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan Agency Theory Jensen & Meckling [25] di mana transparansi berfungsi sebagai mekanisme utama untuk menekan information asymmetry antara pemerintah desa sebagai agent dan masyarakat sebagai principal [26].

Temuan ini relevan dengan kondisi empiris di Kecamatan Laguboti, khususnya kasus penolakan LKPJ Kepala Desa Pardinggaran oleh masyarakat dan BPD akibat ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan realisasi fisik di lapangan. Peristiwa tersebut menegaskan bahwa rendahnya transparansi dapat melemahkan kepercayaan publik dan akuntabilitas pemerintah desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan Lihawa et al. (2025), Saputra et al. (2024), serta Sihotang et al. (2024) yang juga menemukan pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sekaligus berbeda dengan temuan Bahtiar et al. (2024) yang tidak menemukan pengaruh signifikan [27].

Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dibuktikan oleh nilai koefisien jalur β = 0,347, t-statistik = 5,424 > 1,96, dan p-value = 0,000 < 0,05. Nilai effect size (f^2) sebesar 0,177 mengategorikan pengaruh ini dalam kategori efek sedang (Hair et al., 2021). Dengan demikian, H_2 diterima.

Temuan ini bermakna bahwa semakin baik kompetensi aparatur desa – yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja – maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel [28]. Aparatur yang kompeten mampu memahami regulasi, menyusun laporan pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu, serta menyajikan informasi keuangan yang andal kepada masyarakat. Dalam perspektif Agency Theory [29], kompetensi merupakan kapasitas fundamental agent untuk memenuhi kewajibannya kepada principal [30].

Temuan ini dipertegas oleh kondisi empiris di Kabupaten Toba, di mana keterlambatan pencairan Dana Desa Tahap II secara langsung disebabkan oleh ketidakmampuan aparatur desa menyusun LPJ secara tepat waktu dan akurat (Siregar, 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan Bahtiar et al. (2024), Kastanya & Ipijei (2024), serta Sihotang et al. (2024), namun berbeda dengan Ikhwan et al. (2024), Setiyawati et al. (2025), dan Rahmawati et al. (2023) yang tidak menemukan pengaruh signifikan [31]. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik daerah penelitian [32].

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis PLS-SEM menggunakan SmartPLS 3, penelitian ini menarik dua kesimpulan utama. Pertama, transparansi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba (β = 0,411; t = 5,682; p = 0,000). Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang diterapkan pemerintah desa dalam setiap tahapan siklus keuangan desa, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dapat diwujudkan. Kedua, kompetensi aparatur desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Laguboti,

Kabupaten Toba ($\beta = 0,347$; $t = 5,424$; $p = 0,000$). Semakin baik pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja aparatur desa, maka semakin tinggi kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara akuntabel. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut mampu menjelaskan 79,1% variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan dua hal kepada Pemerintah Kecamatan Laguboti dan pemerintah desa. Pertama, pemerintah desa perlu memperkuat praktik transparansi secara konsisten dan berkelanjutan melalui penyampaian informasi keuangan desa kepada masyarakat melalui berbagai media informasi, seperti papan informasi desa, media sosial, dan musyawarah desa. Kedua, pemerintah kecamatan perlu meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan teknis secara berkala, khususnya terkait pengelolaan keuangan desa dan penyusunan laporan pertanggungjawaban yang akurat dan tepat waktu. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain yang relevan seperti sistem pengendalian internal, partisipasi masyarakat, atau komitmen organisasi, serta memperluas cakupan wilayah penelitian guna meningkatkan generalisabilitas temuan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. P. Keuangan, "Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengelolaan Dana Desa," 2023, *Bpk Ri*.
- [2] M. T. G. Bahtiar, O. Wisdaningrum, And B. Wicaksono, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Mangir Rogojampi Kabupaten Banyuwangi," *J. Ekon. Manaj. Akunt. Dan Perpajak.*, Vol. 7, No. 2, Pp. 289–312, 2024.
- [3] N. L. P. S. Dewi And Gayatri, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, Vol. 26, No. 2, Pp. 1269–1296, 2019.
- [4] R. Fajri And J. Julita, "Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *J. Al-Iqtishad*, Vol. 17, No. 2, Pp. 209–227, 2021.
- [5] S. Firmawati, Y. E. Putri, And R. Ramlafatma, "Pengaruh Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sumbawa Barat: The Influence Of The Village Financial System Application (Siskeudes) And Village Appara," *Ganec Swara*, Vol. 19, No. 3, Pp. 852–856, 2025.
- [6] I. C. W. (Indonesia C. Watch), "Laporan Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024," 2025, *Icw*.
- [7] H. Fitra, E. Syofyan, E. Masdupi, E. Mulyani, S. Taqwa, And H. Halmawati, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Ekon. J. Econ. Bus.*, Vol. 8, No. 2, P. 1526, 2024, Doi: 10.33087/Ekonomis.V8i2.1906.
- [8] M. C. Jensen And W. H. Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure," *J. Financ. Econ.*, Vol. 3, No. 4, Pp. 305–360, 1976.
- [9] F. Y. Ikhwan, D. D. Astuti, And L. Rachmawati, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Gaya Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ambulu," *Jakuma J. Akunt. Dan Manaj. Keuang.*, Vol. 5, No. 2, Pp. 121–137, 2024.
- [10] M. Kastanya And I. Ipijei, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan ,Kompetensi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana," *Ekon. Keuangan, Investasi Dan Syariah*, Vol. 5, No. 4, Pp. 598–607, 2024, Doi: 10.47065/Ekuitas.V5i4.5130.

- [11] J. F. Hair, G. T. M. Hult, C. M. Ringle, And M. Sarstedt, *A Primer On Partial Least Squares Structural Equation Modeling (Pls-Sem)*, 3rd Ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2021.
- [12] K. K. Ri, "Perkembangan Dana Desa Tahun 2015–2025," 2025, *Kementerian Keuangan Ri*.
- [13] N. I. P. Lihawa, S. Noholo, And A. Lukum, "Pengaruh Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jambura Account. Rev.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 36–50, 2025.
- [14] Kristianten, *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta, 2006.
- [15] L. M. Spencer And S. M. Spencer, *Competence At Work: Models For Superior Performance*. John Wiley & Sons, 1993.
- [16] S. Mada, L. Kalangi, And H. Gamaliel, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo," *J. Ris. Akunt. Dan Audit. "Goodwill"*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- [17] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, 2018.
- [18] I. Pahlawan, T. Taufik, And A. Silfi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *J. Ekon. Kiat*, Vol. 31, No. 2, 2020.
- [19] R. Indonesia, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara," 2003.
- [20] R. Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," 2014.
- [21] H. Tharis, R. Kusumastuti, And N. Herawaty, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *J. Manaj. Terap. Dan Keuang.*, Vol. 11, No. 04, Pp. 947–958, 2022.
- [22] K. D. Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa," 2018.
- [23] Starbpknews.Id, "Indikasi Pengelolaan Dana Desa Sepihak Di Desa Sitangkola," *Starbpknews.Id*, 2025.
- [24] Y. Saputra, M. S. Sari, And D. Warisi, "Pengaruh Transparansi Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa:(Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)," *Akunt.* 45, Vol. 5, No. 1, Pp. 56–70, 2024.
- [25] S. Sanusi And P. Riyadi, "Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Partisipasi Masyarakat, Komitmen Organisasi, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Media Ilm. Akunt.*, Vol. 11, No. 2, Pp. 91–106, 2023.
- [26] R. Rahmawati, T. Heriana, M. Diana Sari, S. Dewi, And N. Almas, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal," *J. Minfo Polgan*, Vol. 12, No. 1, Pp. 1533–1542, 2023, Doi: 10.33395/Jmp.V12i1.12881.
- [27] S. Siregar, "Hingga Akhir Oktober, Baru 40 Dari 230 Desa Di Toba Cairkan Dana Desa Tahap Ii," *Mistar.Id*, 2025.
- [28] H. Setiyawati, R. Mappanyuki, And P. Rahayu, "Factors Affecting The Financial Accountability Of Village Funds: Evidence From Banten & West Java (Indonesia)," *Financ. Credit Act. Probl. Theory Pract.*, Vol. 4, Pp. 131–144, 2025, Doi: 10.55643/Fcaptp.4.63.2025.4818.
- [29] T. Simanjuntak, "Warga Pardinggaran Tolak Lkpj Ta 2023 Desa Pardinggaran Kabupaten Toba," *Beritarakyat.Online*, 2024.
- [30] E. Savitri, A. Andreas, V. Diyanto, And T. A. Gumanti, "Accountability Of Village Fund Management In Riau Province," *Jrak*, Vol. 14, No. 2, Pp. 131–138, 2022.
- [31] L. M. Simanjuntak, "Kades Sibuea Ditetapkan Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa Rp155 Juta," *Mistar.Id*, 2022. [Online]. Available: [Https://Mistar.Id](https://Mistar.Id)
- [32] A. M. Sihotang, N. Nasrizal, And R. A. Hanif, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Gaya Kepemimpinan, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

- (Studi Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Rakit Kulim Dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya)," *J. Educ. Transp. Bus.*, Vol. 1, No. 2, Pp. 691–703, 2024.
- [33] Sirait, M. S., & Simbolon, H. (2026). The Effect of the Intensity of Artificial Intelligence (AI) Model Use on Academic Procrastination Among Current Students. *Marlajar: Journal of Science, Technology, and Innovation*, 1(2), 78-89.
- [34] Nisa, S. H. K., Santi, T. L., Qur'aini, Q. U., & Setiyawan, H. (2026). Development of Digital Pop-Up Book-Based Learning Media on Waves Material in Integrated Science and Social Studies (IPAS) for elementary School Students. *Marlajar: Journal of Science, Technology, and Innovation*, 1(2), 69-77.
- [35] Sitepu, A. S. B., & Simbolon, H. (2026). The Influence of Personality Type on the Self-Disclosure Patterns of Instagram Second-Account Users in Medan. *Marlajar: Journal of Science, Technology, and Innovation*, 1(2), 102-111.
- [36] Tomi, Y., Kristiono, E., Ratković, N., & Sharlach, T. (2026). Innovation in computer science learning through artificial intelligence and machine learning technologies. *Marlajar: Journal of Science, Technology, and Innovation*, 1(2), 10-66784.
- [37] Siahaan, K. W. A., Simanjuntak, H., Yanti, F., Custilas, A., & Zouhair, E. (2026). Enhancing Student Competence Through SETS-Based Chemistry Instruction on the Colligative Properties of Solutions. *Marlajar: Journal of Science, Technology, and Innovation*, 1(2), 151-167.